



**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN KONSERVASI MANGROVE WANA TIRTA DI DESA JANGKARAN KECAMATAN TEMON KABUPATEN KULON PROGO**

**COLLABORATIVE GOVERNANCE IN THE DEVELOPMENT OF MANGROVE CONSERVATION WANA TIRTA IN JANGKARAN VILLAGE, TEMON DISTRICT, KULON PROGO REGENCY**

Muhammad Fadlan Pinandhika<sup>1</sup>, Dwi Harsono<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

<sup>1</sup>Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Article history:

Diterima 31-01-2023

Diperbaiki 17-02-23

Disetujui 23-02-23

Kata Kunci:

*Collaborative Governance, Stakeholder dan Konservasi Mangrove Wana Tirta*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses *collaborative governance* dalam pengembangan konservasi mangrove wana tirta di Desa Jangkarán Kecamatan Temón Kabupaten Kulón Progo. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif. Teknik analisis data melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Konservasi Mangrove Wana Tirta Kabupaten Kulón Progo. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi *stakeholder* dalam pengembangan konservasi mangrove wana tirta belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari: 1) pada *face to face dialogue* pembentukan forum komunikasi masih secara parsial, 2) *trust building* menunjukkan bahwa *stakeholder* memiliki tujuan yang sama dalam melestarikan dan melindungi ekosistem mangrove, 3) *commitment to process* terdapat hambatan dalam komunikasi dan koordinasi saat kolaborasi serta tidak adanya MoU, 4) *shared understanding* terdapat kecemburuan sosial antar kelompok mangrove di Desa Jangkarán, 5) *intermediate outcomes* menunjukkan bahwa *stakeholder* berupaya mengembangkan konservasi mangrove wana tirta.

ABSTRACT

Keywords:

*Collaborative Governance, Stakeholders and Mangrove Conservation of Wana Tirta*

*This study aims to find out how the collaborative governance process in the development of mangrove conservation wana tirta in Jangkarán Village, Temón District, Kulón Progo Regency. This study used a qualitative descriptive design. Data analysis techniques go through the stages of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. This research was conducted at the Wana Tirta Mangrove Conservation Institute, Kulón Progo Regency. The results of the study show that stakeholder collaboration in the development of mangrove conservation wana tirta has not been maximized. This can be seen from: 1) on the face to face dialogue the establishment of communication forums is still partial, 2) trust building shows that stakeholders have the same goal in conserving and protecting mangrove ecosystems, 3) commitment to process there are obstacles in communication and coordination during collaboration and the absence of an MoU, 4) shared understanding there is social jealousy between mangrove groups in Jangkarán Village, 5) intermediate outcomes show that stakeholders are trying to develop mangrove conservation wana tirta*



## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 17.508 pulau dan garis pantai kurang lebih 18.000 km. Di sepanjang garis pantai ini, terdapat wilayah pesisir yang sangat produktif dan memiliki potensi sumber daya alam hayati dan non-hayati. Kekayaan sumber daya alam wilayah pesisir salah satunya adalah hutan mangrove. Menurut data yang dirilis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Peta Mangrove Nasional 2021, Indonesia memiliki luas mencapai 21% dari total luas hutan mangrove di seluruh dunia (16,5 juta hektar) yaitu seluas 3, 36 juta hektar.

Peran dan fungsi penting hutan mangrove faktanya tidak sejalan dengan lestarinya hutan mangrove yang ada di Indonesia. Menurut *Center for International Forestry Research* (CIFOR), saat ini ekosistem mangrove mengalami tekanan dengan ancaman laju degradasi yang tinggi mencapai 52.000/tahun. Setidaknya sekitar 5% sd 6% hutan mangrove indonesia hilang atau rusak setiap tahunnya. Hal ini telah menyebabkan defortasi ekosistem pesisir, penurunan kualitas air dan terjadinya polusi. Kebijakan konservasi diatur menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Hal ini juga tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (SNPEM). SNPEM merupakan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan ekosistem mangrove lestari dan masyarakat sejahtera berdasarkan sumberdaya yang tersedia.

Salah satu kawasan konservasi hutan mangrove yang ada di Indonesia dan khususnya berada di Daerah istimewa Yogyakarta yaitu Konservasi Hutan Mangrove Wana Tirta yang berada di Dusun Pasir Mendit Desa Jangkar Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo. Pengelolaan konservasi Mangrove Wana Tirta dibenarkan secara hukum pada badan hukum No. 32 Tanggal 16 Maret 2013 sebagai Lembaga Konservasi Mangrove dan Kawasan Pesisir Wana Tirta. Adanya eksploitasi mangrove yang berlebihan oleh masyarakat yang digunakan untuk berbagai tujuan yang menyebabkan kerusakan dan berkurangnya luasan hutan mangrove sepanjang muara sungai bogowonto (Djohan dalam Budiarto, 2017).

Luas Hutan Mangrove di Desa Jangkar termasuk konservasi mangrove wana tirta pada tahun 2002 sebanyak 100 Ha dan pada tahun 2017 menjadi 12 Ha (Walinono dalam Prasetya, 2018). Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap potensi ekosistem mangrove. Banyak pohon mangrove yang ditebang untuk kepentingan luasan tambak menjadi penyebab rusak dan berkurangnya luasan hutan mangrove.

Pengembangan konservasi mangrove Wana Tirta ini menjadi sebuah daya tarik bagi masyarakat maupun wisatawan. Sehingga pada awal tahun 2016 konservasi mangrove Wana Tirta juga mulai dikembangkan untuk kegiatan ekowisata dan diatur berdasarkan Rencana Induk Kepariwisata Daerah (RIPPDA) yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015, kawasan pesisir Kabupaten Kulon Progo termasuk Desa Jangkaran termasuk dalam kategori kawasan pengembangan pesisir untuk ekowisata mangrove.

Keadaan alam yang tidak dapat diprediksi menjadi hambatan, tertutupnya mulut muara sungai bogowonto menimbulkan banjir dan genangan. Selain itu, sampah yang terbawa melalui aliran sungai dan menjadi masalah dalam pengelolaan. Kurangnya partisipasi anggota dari Lembaga Konservasi Mangrove Wana Tirta yang kurang aktif dalam pengelolaan ditunjukkan dengan anggota yang berperan aktif dalam mengelola Konservasi Mangrove Wana Tirta hanya 10 orang dan 15 orang tidak memberikan kontribusi aktif di dalam kegiatan pengelolaan Konservasi Mangrove Wana Tirta (DLH Kulon Progo, 2020:32).

Upaya kolaborasi dibutuhkan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada dalam pengembangan konservasi mangrove wana tirta. Kolaborasi yang sudah dijalankan dalam pengembangan konservasi mangrove wana tirta masih terdapat hambatan dan permasalahan dalam implementasinya. *Face to face dialogue* dalam prosesnya belum terdapat forum komunikasi yang dapat menghambat koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaannya. Sementara itu, *trust building* dan *shared understanding* menunjukkan bahwa adanya kesenjangan sosial yang terjadi antar kelompok pengelola mangrove di desa jangkaran. Hal tersebut dikarenakan adanya kecemburuan dari sektor wisata yang berdampak pada pendapatan perekonomian yang terjadi antar pengelola mangrove didesa jangkaran. Selanjutnya, *intermidate outcomes* menunjukkan bahwa adanya fasilitas seperti jembatan yang sudah usang, papan informasi yang tidak bersikan mater dan kurangnya fasilitas ruangan belajar. Sementara itu, kurangnya perawatan dan pemeliharaan disebabkan karena kurangnya sumber daya anggaran dalam pelaksanaan kolaborasi dalam pengembangan konservasi mangrove wana tirta. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti memfokuskan untuk meneliti “*Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Konservasi Mangrove Wana Tirta Desa Jangkaran, Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo”.

## **1. Metode Penelitian**

### **2.1. Desain Penelitian**

Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menghasilkan data berupa kata-kata lisan maupun tertulis dari orang-orang yang diamati (Moleong, 2012:4). Desain penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan secara mendalam terkait *collaborative governance* dalam pengembangan konservasi mangrove wana tirta di Desa Jangkaran Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo.

## 2.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Konservasi Mangrove Wana Tirta Desa Jangkar, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2021 hingga bulan Juni 2022.

## 2.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau informan penelitian adalah *stakeholder* baik itu aktor publik maupun non-publik yang akan memberikan informasi atau data yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Informan dalam penelitian ini yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kulon Progo, Dinas Pariwisata Kulon Progo, Kalurahan Jangkar, Yayasan Damar, Lembaga Konservasi Mangrove Wana Tirta, PT TWC, Kios Akar Embun, dan Masyarakat.

## 2.4. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:305) dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian itu adalah peneliti itu sendiri. Selain peneliti sebagai instrumen utama, peneliti juga menggunakan instrumen pendukung agar mempermudah pengumpulan data yaitu pedoman observasi dan wawancara, alat perekam, serta catatan lapangan.

## 2.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertama, wawancara. Peneliti melakukan wawancara secara mendalam untuk memperoleh data secara detail data dari setiap aktor yang terkait dengan proses *collaborative governance* dan hambatan yang ada dalam pengembangan konservasi mangrove wana tirta. Adapun kegiatan wawancara dilakukan secara *offline* dan sebagian *online*. Dalam melakukan wawancara *online*, peneliti memanfaatkan aplikasi *Zoom* untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Tujuan metode wawancara ini untuk memperoleh data yang konkret tentang *collaborative governance* dalam pengembangan konservasi mangrove wana tirta di Desa Jangkar Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo.

Kedua, observasi. Guba dan Lincoln dalam Moleong (2014: 174) menyatakan salah satu alasan penggunaan metode observasi dalam penelitian kualitatif adalah memungkinkan melihat dan mengamati sendiri fenomena yang terjadi pada saat penelitian, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Sementara itu, observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan dimana peneliti tidak ikut mengambil bagian dalam kegiatan objek yang diteliti namun peneliti hanya mengamati secara langsung kegiatan dari objek penelitian yang kemudian didokumentasikan ke dalam catatan-catatan lapangan sebagai sumber informasi untuk diolah menjadi bahan analisis dalam pembahasan. Metode ini digunakan untuk mencari data dan informasi mengenai *collaborative governance* dalam pengembangan konservasi mangrove wana tirta di Desa Jangkar, Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo.

Ketiga, dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan cara peneliti mengumpulkan dan mempelajari data yang diperlukan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan bahan penelitian. Menurut Sugiyono (2016:240), Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Selain itu, peneliti juga mengambil gambar serta mendapatkan dokumen pada saat wawancara dilakukan mengenai *collaborative governance* dalam pengembangan konservasi mangrove wana tirta di Desa Jangkar, Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo.

## **2.6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk memeriksa keabsahan data. Peneliti menggunakan jenis triangulasi sumber. Selanjutnya, teknik yang digunakan dalam triangulasi sumber adalah dengan membandingkan antara data informan dari sumber yang berbeda untuk memeriksa kebenaran data dan informasi yang diperoleh untuk menghasilkan data yang valid.

## **2.7. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data menggunakan analisis data interaktif. Sementara itu, Langkah-langkah dalam analisis data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Selanjutnya, akan dilakukan penyajian data yang dipilah sesuai apa yang terjadi di lapangan. Tahapan terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan data, teori, dan hasil diskusi.

## **2. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Collaborative Governance dalam Pengembangan Konservasi Mangrove Wana Tirta di Desa Jangkar Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo**

*Collaborative Governance* merupakan pendekatan dalam menganalisis hubungan antar *stakeholders* dalam mengelola suatu pemarsalahan dalam pemerintahan. Bentuk pendekatan ini dilakukan untuk menyelesaikan suatu pemarsalahan dengan jalan berkolaborasi dan bekerjasama yang melibatkan berbagai instansi, masyarakat, NGO, swasta dan level yang sama untuk menentukan tujuan bersama. Menurut Adrian Devine et al (2011:35) dijelaskan bahwa *collaborative governance* berkaitan penuh dengan pengambilan suatu kebijakan dimana ada proses penyatuan antar *stakeholder*. Sementara itu, kolaborasi antar *stakeholder* dalam pengembangan Konservasi Mangrove Wana Tirta di Desa Jangkar Kabupaten Kulon Progo dapat dikategorikan sebagai kolaborasi dalam arti proses. Hal tersebut disebabkan karena kolaborasi yang terjalin dilaksanakan secara interaktif antar *stakeholder* dan bukan hanya berperilaku saja. Selain itu, penelitian ini berusaha untuk menganalisis proses kolaborasi yang terjadi di antara pemerintah dan *stakeholder* lain untuk dapat melaksanakan implementasi dalam pengembangan Konservasi Mangrove Wana Tirta di Desa Jangkar Kabupaten Kulon Progo

Penelitian ini menjelaskan bahwa pengembangan Konservasi Mangrove Wana Tirta di Desa Jangkar Kabupaten Kulon Progo tidak hanya dilakukan oleh satu stakeholder saja. Keterlibatan dari berbagai stakeholder yang memiliki kewenangan

yang sama sangat diperlukan dalam pengembangan Konservasi Mangrove Wana Tirta di Desa Jangkar Kabupaten Kulon Progo. Dalam praktiknya, kolaborasi sudah terjadi pada pengembangan Konservasi Mangrove Wana Tirta di Desa Jangkar Kabupaten Kulon Progo. Namun, keterlibatan aktor dalam proses *collaborative governance* dalam pengembangan Konservasi Mangrove Wana Tirta kurang menyeluruh. Hal ini merupakan gap antara teori dan praktik. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa di dalam sebuah kolaborasi, diperlukan peran yang menyeluruh dari seluruh *stakeholder* yang terlibat. Maka dari itu, penelitian ini akan menganalisis proses dari kolaborasi dalam pengembangan Konservasi Mangrove Wana Tirta di Desa Jangkar Kabupaten Kulon Progo menurut Ansell and Gash (2008) meliputi indikator sebagai berikut:

**a. *Face to face dialogue* (Dialog Tatap Muka)**

Proses dialog tatap muka antar stakeholder merupakan bagian awal dari terjadinya proses *collaborative governance*. Menurut Ansell and Gash (2008) proses ini bertujuan untuk mencapai pada konsensus atau kesepakatan bersama. Dialog tatap muka merupakan media yang efektif dalam berkomunikasi untuk menyampaikan informasi serta memberikan feedback kepada pihak yang terlibat. Maka, dialog tatap muka menjadi proses yang penting dilakukan oleh stakeholder yang terlibat dalam membahas dan menyampaikan hal yang berkaitan dalam sebuah proses *collaborative governance*.

Menurut penelitian terdahulu oleh Avni Rahmi Putri (2021) tentang Proses *Collaborative Governance* Dalam Implementasi Program Konservasi Penyus Di Desa Maligi Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat bahwa dialog tatap muka dilakukan ketika adanya program kegiatan saja. Namun, komunikasi dan koordinasi yang dilakukan masih perlu ditingkatkan lagi. Sementara itu, hal serupa juga terdapat dalam penelitian ini yaitu tentang *collaborative governance* dalam pengembangan konservasi mangrove wana tirta di Desa Jangkar Kabupaten Kulon Progo bahwa hasil observasi *face to face dialogue* atau dialog tatap muka dilakukan ketika adanya program kegiatan dalam konservasi mangrove wana tirta. Hal tersebut merupakan gap karena dalam Ansell and Gash menekankan enam kriteria penting tata kelola kolaboratif, yaitu forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif.

*Face to face dialogue* dalam pengembangan konservasi mangrove wana tirta dapat dibuktikan dengan adanya proses sosialisasi, edukasi maupun pelatihan yang dilakukan oleh stakeholder yang terlibat sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Hal ini juga dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pengelola konservasi mangrove wana tirta dalam menghadapi permasalahan dalam pengelolaan konservasi yakni kondisi alam yang tidak dapat di prediksi dan sampah yang dapat berpotensi menghambat pertumbuhan ekosistem mangrove.

Keterlibatan *stakeholder* dalam pengembangan konservasi mangrove wana tirta berupaya untuk mengatasi masalah tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perencanaan penanaman bibit mangrove dengan menentukan waktu tanam saat kondisi muara sungai bogowonto tidak pasang dan pemilihan lokasi penanaman dalam kawasan konservasi wana tirta. Selain itu, keterlibatan pemerintah juga ditunjukkan dengan adanya upaya pembangunan pengaman muara sungai bogowonto yang dilakukan oleh PPID Serayu Opak yang bertujuan sebagai

pengendali banjir. Sementara itu, sampah juga menjadi kendala dalam pengembangan konservasi mangrove wana tirta. Hal ini dikarenakan sampah dapat berpotensi menghambat pertumbuhan bibit mangrove. Sampah yang ada pada kawasan konservasi mangrove wana tirta bersumber dari pengunjung atau wisatawan yang datang pada konservasi mangrove wana tirta dan sampah kiriman yang terbawa arus melalui banjir pada muara sungai bogowonto. Selanjutnya, upaya *stakeholder* ditunjukkan dengan adanya pemasangan jaring sampah pada muara sungai bogowonto yang bertujuan untuk menahan banyaknya sampah. Namun, dalam penerapannya, pemasangan jaring sampah tidak dapat menahan volume sampah yang sangat banyak sehingga berdampak pada adanya persebaran sampah yang terdapat pada kawasan konservasi mangrove wana tirta. Terlebih lagi, dalam praktiknya masih diperlukan evaluasi dalam mengatasi sampah kiriman yang dapat berpotensi menghambat pertumbuhan ekosistem mangrove. Selanjutnya, permasalahan sampah yang disebabkan oleh kunjungan wisatawan dilakukan edukasi dan sosialisasi oleh stakeholder yang terlibat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pemberian bak sampah terpilah oleh DLH Kulon Progo dan DINPAR Kulon Progo dalam sosialisasi menjaga lingkungan konservasi mangrove wana tirta.

Analisis terhadap praktik kolaborasi pengembangan konservasi mangrove wana tirta bisa dikatakan belum optimal. Hal ini dapat dilihat dalam penerapannya, yakni tidak adanya pemebentukan forum komunikasi secara menyeluruh yang dapat membuat kolaborasi tidak berjalan secara efektif dan efisien. Forum komunikasi berfungsi sebagai wadah dalam menampung aspirasi, merancang rencana strategis, membahas terkait pengembangan konservasi mangrove wana tirta dan juga evaluasi pelaksanaannya. Namun, tidak adanya forum komunikasi menjadi hambatan yang dirasakan. Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi tidak dilakukan dengan keterlibatan pihak secara menyeluruh atau forum hanya bersifat parsial. Hal tersebut merupakan *gap* antara teori dan praktik. Menurut Ansell and Gash (2008) yang menekankan enam kriteria penting tata kelola kolaboratif, yaitu peserta forum termasuk aktor non-pemerintah. Sementara itu, forum komunikasi yang terdapat dalam kolaborasi pengembangan konservasi mangrove wana tirta di Desa Jangkaran Kulon Progo tidak melibatkan seluruh *stakeholder* dalam kolaborasi pengembangan konservasi mangrove wana tirta. Hal tersebut dapat menimbulkan adanya perbedaan pandangan dan ketidaksinkronasi agenda kegiatan program yang efektif dan efisien. Selain itu, analisis terhadap praktik kolaborasi pengembangan konservasi mangrove wana tirta bisa dikatakan belum optimal. Hal ini dapat dilihat dalam penerapannya, yakni tidak adanya pemebentukan forum komunikasi secara menyeluruh yang dapat membuat kolaborasi tidak berjalan secara efektif dan efisien.

#### **b. Trust Building (Membangun Kepercayaan)**

Membangun kepercayaan merupakan proses yang penting dalam pelaksanaan kolaborasi, jika antar stakeholder yang terlibat tidak mampu membangun kepercayaan maka proses *collaborative governance* tidak akan berjalan dengan tujuan yang ingin dicapai. DeSeve (2007) mengungkapkan kepercayaan diantara aktor merupakan salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Membangun kepercayaan (*trust building*) di antara aktor dilakukan untuk meningkatkan kontrol pada pihak yang terlibat dalam mencapai tujuan dari *collaborative governance*.

Bentuk membangun kepercayaan yang dilakukan dalam Pengembangan Konservasi Mangrove Wana Tirta Kabupaten Kulon Progo di antara pemerintah, swasta, LSM, pengelola maupun masyarakat digunakan cara yaitu dengan komunikasi serta koordinasi antar pihak-pihak terkait. Membangun kepercayaan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam *collaborative governance* antar *stakeholder* dan merupakan sebuah proses yang memakan waktu serta memerlukan komitmen jangka panjang untuk mencapai hasil kolaborasi (Ansell and Gash, 2008). Membangun kepercayaan lewat koordinasi dan komunikasi menjadi cara *stakeholder* atau pihak yang terlibat dalam pengembangan konservasi mangrove wana tirta dalam menjalankan proses kolaborasi. Namun, dalam pelaksanaan koordinasi dan komunikasi yang dilakukan antar *stakeholder* dalam pengembangan Konservasi Mangrove Wana Tirta tidak dilakukan secara menyeluruh. Hal ini disebabkan tidak ada forum komunikasi terkait pengembangan Konservasi Mangrove Wana Tirta sehingga komunikasi maupun koordinasi hanya dilakukan secara parsial yang terlibat koordinasi serta komunikasi.

Hasil identifikasi penelitian menjelaskan bahwa proses kolaborasi dalam pengembangan konservasi mangrove wana tirta, komunikasi dan koordinasi hanya dilakukan ketika adanya program dan kegiatan yang dilakukan dalam konservasi mangrove wana tirta. Selanjutnya, pelaksanaan forum komunikasi pernah dilakukan dalam unit kelompok yang dibentuk melalui SK Bupati Nomor 360 Tahun 2011 yakni Pokja Mangrove. Tetapi dalam perjalanannya, keterbatasan anggaran dana daerah menjadi hambatan dalam prosesnya sehingga berdampak pada hilangnya wadah dalam pelaksanaan koordinasi dan komunikasi dalam proses kolaborasi pengembangan konservasi mangrove wana tirta.

#### c. *Commitment to Process* (Komitmen Terhadap Proses)

Komitmen terhadap proses yang ada dalam proses *collaborative governance* merupakan faktor penting dari keberhasilan *collaborative governance*. Deseve (2007) mengatakan bahwa salah satu indikator keberhasilan yakni *commitment to common purpose* dimana masing-masing aktor memiliki alasan dan komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan bersama dalam proses. Sementara itu, komitmen dalam proses kolaborasi sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Namun, hasil identifikasi penelitian menunjukkan bahwa terdapat kurangnya partisipasi aktif dari beberapa anggota yang terlibat dalam pengelolaan konservasi mangrove wana tirta yang disebabkan oleh kesenjangan sosial yang terjadi antar kelompok mangrove di Desa Jangkar. Namun demikian, tujuan dilakukannya kolaborasi yakni untuk mengatasi permasalahan yang tidak bisa diatasi secara individu. Maka, dalam hal ini keterlibatan *stakeholder* menjadi hal penting dalam menjalankan visi misinya untuk mencapai tujuan bersama yaitu pengembangan konservasi mangrove wana tirta dan permasalahan dalam prosesnya.

Harapan berjalannya proses *collaborative governance* adalah masing-masing *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan konservasi mangrove wana tirta di Desa Jangkar Kabupaten Kulon Progo memiliki tujuan yang sama dan komitmen dalam pelaksanaannya. Terlebih lagi, pihak pemerintah dalam *collaborative process* menjadi tanggung jawab atas terlaksananya program pengembangan konservasi mangrove wana tirta seperti memimpin koordinasi, menyelenggarakan forum, monitoring program implementasi terhadap konservasi mangrove wana tirta dan

berkoordinasi dengan *stakeholder* yang terlibat. Selain itu, juga edukasi, pelatihan dan pengembangan kapasitas. Hal tersebut tidak dapat dilakukan secara individu. Namun, hal tersebut dilakukan bersama dengan keterlibatan *stakeholder* lain sebagai wujud berbagi tanggung jawab karena kepercayaan yang sudah dibangun (Ansell and Gash, 2008:560). Selanjutnya, adanya proses pelaksanaan edukasi, sosialisasi dan pemberian bibit mangrove yang dilakukan oleh *stakeholders* dalam menunjukkan bahwa adanya bentuk komitmen dalam upaya pengembangan konservasi mangrove wana tirta. Kolaborasi dalam pengembangan konservasi mangrove wana tirta dapat berjalan dengan efektif jika *stakeholder* yang terlibat memiliki tujuan yang sama. Maka, adanya MoU dapat mendukung pelaksanaan kolaborasi. Namun, *collaborative governance* dalam pengembangan konservasi mangrove wana tirta di Desa Jangkar Kabupaten Kulon Progo menunjukkan dalam pelaksanaannya tidak adanya MoU atau perjanjian kerjasama antar pihak yang terlibat. Hal tersebut dapat mempengaruhi komitmen stakeholder. Hal ini tentu saja dapat menjadi penghambat bagi jalannya kolaborasi karena merasa tidak terikat dalam upaya pengembangan konservasi mangrove wana tirta

**d. *Shared Understanding* (Pemahaman Bersama)**

Pemahaman bersama dalam merupakan proses penyamaan persepsi atau pemahaman untuk mencapai tujuan dan sasaran bersama. Ansell and Gash (2008) mengungkapkan bahwa pemahaman bersama merupakan pengembangan pemahaman bersama mengenai visi, misi, tujuan dan ideologi bersama.

Pelaksanaan *shared understanding* dalam pengembangan konservasi mangrove wana tirta berjalan tetapi terdapat permasalahan di dalamnya. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya *shared understanding* dalam proses pengembangan konservasi mangrove wana tirta. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya kecemburuan sosial yang terjadi dalam masyarakat yakni antar kelompok pengelola mangrove di desa jangkar kabupaten kulon progo dan berdampak pada kurangnya komitmen keanggotaan dalam kelembagaan konservasi mangrove wana tirta itu sendiri. Terlebih lagi, pihak yang terlibat dalam proses pengembangan konservasi mangrove memiliki latar belakang yang berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama yakni mangrove yang lestari, terlindungi dan berkelanjutan. Tetapi, dalam pelaksanaannya setiap pihak memiliki program yang disesuaikan dengan tupoksinya masing-masing dan terkadang menimbulkan sikap ego sektoral dalam pelaksanaannya. Sementara itu, pemahaman bersama tidak dapat dijalankan apabila pihak yang terlibat di dalamnya tidak bersedia untuk menyamakan persepsi (Aranda, dkk, 2007:244). Maka, dapat disimpulkan bahwa *shared understanding* atau pemahaman bersama dalam pengembangan konservasi mangrove wana tirta belum terbangun secara optimal karena masih adanya kurangnya kesepahaman dan sikap ego sektoral dalam pelaksanaannya.

**e. *Intermidate Outcomes* (Hasil Sementara)**

*Intermidates outcome* (hasil sementara) merupakan hasil yang didapatkan setelah dilakukannya proses kolaborasi yang dilakukan dan memperoleh suatu hasil akhir. Hasil sementara dalam proses kolaborasi bersifat sementara dan bukan sebagai tujuan utama. Maka hasil sementara dapat dikatakan konkrit apabila kolaborasi yang dijalankan berhasil. Sementara itu, tujuan utama dalam

pengembangan Konservasi Mangrove Wana Tirta untuk menciptakan ekosistem mangrove yang lestari, terlindungi dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sesuai dengan tujuan konservasi.

Hasil konkrit sementara dalam pengembangan Konservasi Mangrove Wana Tirta Di Desa Jangkar Kabupaten Kulon Progo ditunjukkan dengan adanya apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo kepada Lembaga Konservasi Mangrove Wana Tirta dalam acara penerimaan Penghargaan Insan Penggiat Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo pada Selasa 20 Desember 2016 sebagai Peraih kalpataru penyelamat lingkungan. Selanjutnya, *intermidates outcomes* yang dihasilkan dengan adanya keterlibatan dari berbagai pihak baik pemerintah, swasta, LSM, masyarakat dan pihak terkait yang ikut berkontribusi dalam pengembangan konservasi mangrove wana tirta sesuai dengan tupoksi masing-masing. Adanya dukungan yang dilakukan dalam bentuk kolaborasi memberikan dampak yang berpengaruh terhadap perkembangan kawasan mangrove wana tirta baik dari segi anggaran, penanaman, pemberian bibit dan promosi Konservasi Mangrove Wana Tirta.

Menurut DeSeve (2007:50) menyebutkan bahwa terdapat beberapa kriteria untuk memenuhi keberhasilan kolaborasi salah satunya yakni *Access to Resources* (akses terhadap sumber daya). Dalam pengembangan konservasi mangrove wana tirta sumber daya meliputi sumber daya manusia, keuangan, fasilitas dan sumber daya lainnya. Namun, dalam pelaksanaannya keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala yang dirasakan oleh lembaga konservasi mangrove wana tirta. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya fasilitas yakni ruang belajar atau perpustakaan yang berisikan informasi baik itu buku-buku ataupun yang berkaitan dengan ekosistem mangrove untuk menunjang jalannya konsep eco edu dari konservasi mangrove wana tirta. Selain itu, pengawasan dan pemeliharaan sarana prasarana dalam konservasi mangrove wana tirta juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan. Hal tersebut dikarenakan adanya fasilitas seperti jembatan dan papan informasi yang terlihat usang. Terlebih lagi, dalam pengembangan konservasi mangrove wana tirta fasilitas tersebut diperlukan dalam mendukung pengelolaan konservasi mangrove wana tirta untuk mencapai ekosistem mangrove yang lestari dan terlindungi sesuai dengan tujuan konservasi.

### **3. Kesimpulan**

*Collaborative Governance Process* dalam pengembangan Konservasi Mangrove Wana Tirta di Desa Jangkar Kabupaten Kulon Progo yang telah dilakukan belum optimal, dikarenakan masih terdapat beberapa indikator yang belum terpenuhi. Sementara itu, dari sudut pandang *collaborative governance*, prakondisi menunjukkan bahwa proses kolaborasi yang dijalankan sudah ada. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kriteria indikator yang tidak terpenuhi yaitu pembentukan forum komunikasi yang tidak menyeluruh, kurang optimalnya sinergitas antar pihak yang terlibat dalam menyelesaikan permasalahan internal kelompok mangrove di desa jangkar dan hasil sementara menunjukkan bahwa kolaborasi sudah dilakukan.

Hasil Kolaborasi menunjukkan bahwa stakeholder yang terlibat berupaya dalam mengembangkan konservasi mangrove wana tirta. Hal ini dapat dilihat dari adanya

peningkatan pertumbuhan ekosistem mangrove wana tirta, adanya fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang jalannya pengelolaan dan dikenalnya konservasi mangrove wana tirta di mata publik. Namun, dalam penerapannya masih diperlukan evaluasi untuk stakeholder yang terlibat dalam mengatasi permasalahan yang ada dalam pengembangan konservasi mangrove wana tirta.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang proses Dalam Pengembangan Konservasi Mangrove Wana Tirta Di Desa Jangkar Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo masih terdapat beberapa permasalahan, untuk memperbaiki permasalahan kedepannya maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pembentukan wadah forum komunikasi dengan melibatkan semua yang terlibat sebagai wadah untuk komunikasi dan koordinasi.
2. Pengadaan anggaran khusus dalam pengelolaan dan pengembangan ekosistem mangrove termasuk fasilitas pembangunan sarana dan prasarana konservasi mangrove wana tirta.
3. Penyusunan *masterplan* perencanaan strategis pengelolaan dan pengembangan ekosistem mangrove wana tirta.

### Referensi

- [1] Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative governance in theory and practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- [2] Aranda, J., Khuwaja, R., & Easterbrook, S. (2007). Discovering the shared understanding dynamics of large software teams. In *Proceedings of the 2007 conference of the center for advanced studies on collaborative research* (pp. 244-247).
- [3] Budiarto, A. (2017). Evaluasi Kondisi Komunitas Konservasi Mangrove : Studi Kasus Lembaga Pelestari Mangrove Dan Pesisir Wana Tirta Kulon Progo Diy. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Berkelanjutan*, ISBN: 978–, 824–836.
- [4] Cahya, N. (2020). Proses Collaborative Governance Dalam Penerapan Uang Elektronik (Unik) Di Jalan Tol KOTA MAKASSAR. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- [5] Caryl, E., Christopher, A., Ximena, A., Kruglanski, H. A., & Tory, E. (2011). *The investment model of commitment processes*. *Handbook of theories of social psychology*, 4(6), 218-231.
- [6] Danu P, Johan, Yohana N M, Istiana R. (2018). Hierarki Pengelolaan Ekowisata Mangrove Di Desa Jangkar, Kabupaten Kulon Progo. *Seminar Nasional, Call Paper & Pameran Hasil. UPN Veteran Yogyakarta*, 601-611.
- [7] DeSeve, E. (2007). *Creating public value using managed networks*. *Transforming public leadership for the 21st century*, 203-220.
- [8] Donato, D. C., Kauffman, J. B., Murdiyarto, D., Kurnianto, S., Stidham, M., & Kanninen, M. (2012). Mangrove adalah salah satu hutan terkaya karbon di kawasan tropis. *CIFOR Brief*, 13(12), 12.
- [9] Fistingrum, W., & Harini, R. (2021). *The impacts of mangrove ecotourism management on the socio-economic conditions of people in kulonprogo regency*. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 683(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/683/1/012116>
- [10] Haryono, N. (2012). Jejaring untuk membangun kolaborasi sektor publik. *Jurnal Jejaring Administrasi Publik*.
- [11] J.Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- [12] Khakhim, N., Marfai, M. A., Wicaksono, A., Lazuardi, W., Isnaen, Z., & Walinono, T. (2019). *UAV mapping for Mangrove ecosystem management in the coastal area of special region Yogyakarta*. 55. <https://doi.org/10.1117/12.2541392>

- [13] Prasetya, J. D., Maharani, Y. N., & Rahatmawati, I. (2018). *Mangrove ecotourism management at local community in Jangkaran, Kulonprogo, using hierarchy analysis. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 212(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/212/1/012006>
- [14] Sudarmo. 2011. *Isu-Isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance*. Solo: Smart Media.
- [15] Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Daellenbach, Hans G., McNickle, Donald C., *Management science, Decision making through systems thinking*, Palgrave Macmilan, 2005.